

## BAB 4

### KESIMPULAN

Penandatanganan Deklarasi Potsdam pada tanggal 2 September 1945 merupakan tanda menyerahnya Jepang kepada Sekutu. Hal ini mengakibatkan hilangnya kedaulatan Jepang dalam menentukan nasibnya sendiri. Seluruh kekuasaan diserahkan kepada pemerintah pendudukan Sekutu.

Dalam menjalankan kekuasaannya di Jepang, Sekutu membentuk organisasi yang berfungsi menyusun kebijakan serta menjalankan kebijakannya di Jepang. Sekutu membentuk *Far Eastern Commission* (FEC) atau Komisi Timur Jauh sebagai Komisi yang bertugas untuk menyusun kebijakan-kebijakan yang akan diterapkan di Jepang. Sedangkan *Supreme Commander of Allied Power* (SCAP) atau Panglima Tertinggi Pasukan Pendudukan Sekutu merupakan pelaksana seluruh kebijakan yang diterapkan di Jepang. Selain itu ada juga *Allied Council* atau Dewan Sekutu yang berfungsi sebagai pemberi saran terhadap kebijakan yang disusun dan diterapkan di Jepang.

Berbagai kebijakan dikeluarkan oleh pemerintah pendudukan di Jepang selama tujuh tahun sejak 1945 sampai 1952. Tujuan utamanya adalah untuk menjamin Jepang tidak akan pernah mengancam keamanan dan kedamaian dunia lagi, dan juga untuk membentuk pemerintahan di Jepang yang demokratis dan damai, sesuai dengan kebebasan berkehendak dari masyarakat Jepang, yang menghormati hak-hak negara lain serta yang mendukung tujuan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Secara umum kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah pendudukan Sekutu menyentuh dua hal yaitu demiliterisasi dan demokratisasi di segala bidang.

Pendidikan juga merupakan bidang yang menjadi perhatian pasukan pendudukan sekutu. Demokratisasi pendidikan dilakukan dengan memberikan kesempatan sama kepada seluruh masyarakat Jepang baik pria maupun wanita untuk mendapatkan pendidikan yang sama. Materi dari pendidikan Jepang juga

disesuaikan dengan tidak mengarah kepada pendidikan militer yang dapat mengancam perdamaian dunia seperti pada masa perang. Pendidikan Jepang juga didesentralisasikan agar sesuai dengan kebutuhan tiap-tiap masyarakat di daerah tertentu.

Setiap perubahan dan perkembangan pendidikan di Jepang merupakan hasil penerapan kebijakan yang dikeluarkan oleh Sekutu, namun tetap ada peran pemerintah Jepang di dalamnya. Dalam melaksanakan kebijakannya, Sekutu bekerja melalui badan-badan pemerintahan yang ada di Jepang, karena Sekutu menilai bahwa masyarakat Jepang harus menyelesaikan reformasi melalui kekuatan mereka sendiri. Demokrasi tidak akan bertahan lama jika dipaksakan.

Dari analisis kepustakaan dapat disimpulkan bahwa pemerintah Jepang memiliki peran di dalam pendidikan Jepang selama masa pendudukan. Peran pemerintah Jepang di antaranya adalah membuat kebijakan pendidikan Jepang yang baru setelah Jepang menyerah kepada Sekutu. Berdasarkan perintah SCAP, pemerintah Jepang membentuk Komite Pendidikan Jepang yang bertugas membantu Utusan Pendidikan dari Amerika Serikat dalam mengembangkan pendidikan Jepang ke arah yang lebih demokratis. Pemerintah Jepang juga membentuk Kyōiku Sashin Inkai (教育刷新委員会) atau Dewan Pembaharuan Pendidikan (pengganti Komite Pendidikan Jepang) untuk melaksanakan perintah SCAP dalam merealisasikan rekomendasi yang dihasilkan oleh Komite Pendidikan Jepang bersama dengan Utusan Pendidikan Amerika Serikat. Kementerian Pendidikan Jepang juga menyusun Garis Besar Panduan Belajar atau *Gakushishūdōyōryō* (学士修道要領). Peran Pemerintah Jepang juga dapat dilihat dari Konstitusi Jepang yang baru tahun 1947, yang memuat sembilan pasal yang berkaitan dengan pendidikan. Melalui Dewan Pembaharuan Pendidikan juga dihasilkan Hukum Dasar Pendidikan 1947 atau *Kyōiku Kihon Hō* (教育基本法) dan *Gakkō Kyōiku Hō* (学校教育法) atau Undang-Undang Pendidikan Sekolah. Melalui Hukum Dasar dan Undang-Undang Sekolah ini lah masalah pendidikan Jepang diatur.